

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Cilacap

60% Dana Desa Tersalurkan

<http://satelitpost.com/regional/60-dana-desa-tersalurkan>

CILACAP, SATELITPOST-Penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa sampai Agustus kemarin tersalurkan sekitar 60 persen. Dari pagu sebesar Rp 232.084.054.000, sudah tersalurkan sebesar Rp 139,250 miliar lebih.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari pagu senilai Rp 146.106.765.000 sudah tersalurkan sebesar Rp 73,053 miliar lebih, atau baru 50 persen. Hal tersebut dikemukakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cilacap, Achmad Arifin, SH, MM.

"Untuk tahap ke 2 belum (tersalurkan), yang sudah cair tahap I. Tahap II mudah-mudahan di cairkan pada September. Tapi ini yang harus dilakukan oleh di Pemdes, surat pertanggungjawaban harus masuk dulu sebelum pencairan kedua," katanya kemarin.

Untuk penyalurannya, kata dia modelnya juga berubah, mekanisme pelaporan dari bupati tidak langsung ke Kementerian Keuangan, namun melalui KPPN Kabupaten Cilacap. Sebagai syarat untuk penyaluran tahap kedua melalui KPPN tersebut, Pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama melalui aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Omspan).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Drs Farid Maruf MM mengatakan, dengan adanya dana stimulan bagi desa ini, maka masyarakat dan Pemerintah Desa dituntut lebih mampu menunjukkan keberanian dan kreativitas. Untuk menghasilkan berbagai inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. "Banyaknya bantuan keuangan kepada desa ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan rencana penggunaan yang sudah dibuat," katanya.

Pemkab tidak menginginkan di kemudian hari ditemukan kasus penyalahgunaan dana-dana tersebut. Untuk itu kepada camat dan jajarannya, kades dan perangkat desanya agar mempelajari aturan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang ada sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Jangan membuka aturan hanya ketika ada masalah.

"Kepala desa lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, jangan melanggar peraturan, pantau pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan di desa agar tidak terjadi penyimpangan," katanya. **(ale)**